



Raperda Disabilitas Paripurna Desember

UMBULHARJO (MERAPI) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta kini memasuki tahap fasilitasi Pemda DIY. Diharapkan pembahasan fasilitasi raperda yang masuk program pembentukan perda (propemperda) tahun 2016 itu cepat dilaksanakan, sehingga bisa diparipurnakan Desember 2018.

"Saat ini raperda masih difasilitasi di Biro Hukum DIY. Semoga kalau fasilitasi di DIY bisa cepat, raperda diparipurnakan Desember ini," kata Ketua Pansus Raperda Disabilitas, DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Fauzan, Rabu (12/12).

Menurutnya sisa waktu di Desember ini masih bisa untuk memproses paripurna raperda disabilitas. Pembahasan raperda disabilitas di pansus sudah selesai. Setelah difasilitasi di Pemda DIY, raperda akan memasuki tahap finalisasi untuk diparipurnakan. Namun pihaknya tidak dapat memastikan waktu yang dibutuhkan untuk fasilitasi raperda disabilitas itu di DIY.

"Itu (waktu fasilitasi) yang tidak bisa dipastikan. Harapan kami proses fasilitasi bisa cepat. Setelah fasilitasi, kalau ada catatan yang substantif, tinggal rapat internal untuk kesimpulan pansus, terus diparipurnakan," paparnya.

Dia menjelaskan dari pembahasan terakhir raperda pansus sudah melibatkan komunitas penyandang disabilitas, Komite Disabilitas DIY serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Materi-materi yang sudah diatur dalam Undang Undang Disabilitas lanjutnya, sudah didrop dari raperda. Namun tetap dicantumkan dasar hukum Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai pengantar di raperda.

Pihaknya menyatakan aspirasi dari komunitas disabilitas sudah diakomodasi di raperda disabilitas. Misalnya terkait unsur kelokalan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. "Layanan terkait pendidikan, infrastruktur dan kesehatan yang bisa diakses penyandang disabilitas. Pada pendidikan unsur kelokalan misalnya ada layanan *home care* bagi penyandang disabilitas," terang Fauzan.

Secara terpisah Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti menyampaikan pansus raperda disabilitas dan komite disabilitas sudah berkomitmen untuk menyelesaikan raperda tahun ini. Apalagi pembahasan sudah disupervisi oleh Kemenkum HAM secara intensif.

"Targetnya raperda disabilitas selesai Desember ini. Fasilitasi raperda di Biro Hukum DIY butuh waktu. Tapi untuk nomor registrasi raperda di DIY, masih diberi waktu kelonggaran. Jika terpaksa, Januari tinggal tunggu nomor registrasi tapi raperda selesai Desember," tandas Bambang. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005